


2024

Rencana KERJA




ESDM
SUMBAR

 0751- 7054487, 7052146

 esdm@sumbarprov.go.id

 esdm.sumbarprov.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.....	15
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	37
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	40
BAB V PENUTUP	53

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, merupakan bahan masukan dalam rangka menetapkan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran, serta skala prioritas pembangunan tahunan.

Rencana Kerja (Renja) ini mengacu kepada :

- a. Arah Pembangunan yang tertuang dalam Pentahapan RPJP-D Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
- b. Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
- c. Melaksanakan Renstra SKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
- d. Sasaran pokok arah kebijakan RPJP Provinsi Tahun 2005-2025 pada tahapan RPJMD ke-4 (2021-2026).

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas, baik dari instansi terkait di Kabupaten/Kota maupun stakeholder lainnya yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Juli 2023

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Barat


Ir. HERRY MARTINUS, MM
NIP. 19650310 199303 1 004

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan salah satu kewajiban bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai penterjemah Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Renja Dinas ESDM) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2021-2026 yang berisikan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas, sasaran pembangunan daerah dan rencana program serta kegiatan prioritas tahun 2024.

Renja Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari RPJMD tahun 2021-2026, dan disusun dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya/kegiatan-kegiatan yang belum mencapai target pada tahun sebelumnya serta mempertimbangkan kondisi terakhir tahun 2022 juga permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2023.

Proses penyusunan Renja Dinas ESDM didasarkan pada usulan kegiatan dari masing-masing bidang yang secara formal akan diformulasikan melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renja Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, disusun berdasarkan program dan kegiatan APBD sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Oleh karena itu program pembangunan yang tertuang dalam Renja DESDM Tahun 2024 akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA PPAS Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi.
4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
6. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari.
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan maksud sebagai acuan tertulis dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral di Provinsi Sumatera Barat untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah:

1. Menetapkan prioritas pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 sesuai dengan kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
2. Memberikan arah yang jelas melalui implementasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 untuk tercapainya tujuan, sasaran dan target kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika penulisan Renja Dinas ESDM ini disusun sebagaimana berikut ini :

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Rencana Kerja beserta Pendanaan Program Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.

BAB 5 PENUTUP

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD

2.1.1. Realisasi Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

Program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yang tidak memenuhi target adalah tidak ada. Dengan kata lain seluruh program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat memenuhi target yang ditetapkan.

2.1.2. Realisasi Program dan Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

URUSAN PILIHAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Urusan Pilihan : Energi Sumber Daya Mineral yang meliputi Program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, capaian pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas ESDM selama satu tahun (realisasi fisik kegiatan adalah 100%).
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, capaian pelaksanaan kegiatan adalah terciptanya administrasi perkantoran dan tertibnya administrasi keuangan selama satu tahun (realisasi fisik kegiatan 100%).
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, capaian pelaksanaan kegiatan adalah tercapainya pengamanan asset selama satu tahun (realisasi fisik kegiatan 100%).
- d. Kegiatan Administrasi Kepengawainan Perangkat Daerah, capaian pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya pakaian dinas dan meningkatnya kapasitas SDM (realisasi fisik kegiatan 100%).
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, capaian pelaksanaan kegiatan adalah terciptanya administrasi perkantoran selama satu tahun (realisasi fisik kegiatan 100%).
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, capaian pelaksanaan kegiatan adalah Tersedianya kendaraan dinas operasional sebanyak 1 unit (realisasi fisik kegiatan adalah 100%).
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, capaian pelaksanaan kegiatan adalah terciptanya administrasi perkantoran (Terlaksananya urusan surat menyurat dinas, Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, spanduk, air dan listrik, Terbinanya fisik dan mental aparatur, terciptanya kebersihan keamanan dan lancar mobilitas kantor) selama satu tahun (realisasi fisik kegiatan 100%).

- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, capaian pelaksanaan kegiatan adalah terselenggaranya administrasi perkantoran (Tersedianya suku cadang, pajak, STNK dan asuransi, terpeliharanya/tersehabnya gedung kantor, terpeliharanya peralatan, perlengkapan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor) selama satu tahun (realisasi fisik kegiatan 100%).

2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian.

- a. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi, capaian pelaksanaan kegiatan adalah persentase luasan daerah konservasi air tanah 37,5 persen (realisasi fisik kegiatan 100%).

3. Program Pengelolaan Energi Terbarukan.

- a. Kegiatan Pelaksanaan konservasi energi di wilayah provinsi, capaian pelaksanaan kegiatan adalah jumlah reduksi CO₂ Bidang Energi (non transportasi), Porsi energi terbarukan pada bauran energi sebesar 29 persen (realisasi fisik kegiatan 100%).

4. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.

- a. Kegiatan Penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi, capaian pelaksanaan kegiatan adalah rasio elektrifikasi 99,5 persen (realisasi fisik kegiatan 100%).
- b. Kegiatan Penatausahaan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri, capaian pelaksanaan kegiatan adalah rasio elektrifikasi 99,5 persen (realisasi fisik kegiatan 100%).
- c. Kegiatan Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan, capaian pelaksanaan kegiatan adalah rasio elektrifikasi 99,5 persen (realisasi fisik kegiatan 100%).

2.1.3. Realisasi Program dan Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yang melebihi target adalah tidak ada. Dengan kata lain seluruh program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat memenuhi target yang ditetapkan.

2.1.4. Faktor-faktor Penyebab Terpenuhinya Target Kinerja Program/Kegiatan.

Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat berhasil mencapai target kinerja program/kegiatan tahun 2022 dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor internal

maupun eksternal. Faktor internal pendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat antara lain adalah baik dan matangnya perencanaan pelaksanaan kegiatan, solidnya tim pelaksana kegiatan, adanya monitoring dan evaluasi internal, terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik inter dan antar bidang, serta tertibnya administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun faktor eksternal pendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat antara lain adalah tersedianya anggaran yang mencukupi untuk pelaksanaan program/kegiatan, terjalannya kerjasama yang baik dengan berbagai pihak pendukung pelaksanaan program/kegiatan, serta keseriusan pihak terkait untuk menyelesaikan pekerjaan (pelaksanaan kegiatan).

2.1.5. Implikasi yang Timbul Terhadap Capaian Program Renstra Perangkat Daerah.

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat maka implikasi dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat Sumatera Barat yang belum berlistrik sehingga terwujudnya peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat di Sumatera Barat, meningkatnya kesadaran seluruh pengguna air tanah untuk memenuhi kewajibannya, peningkatan tata kelola usaha pertambangan di Sumatera Barat serta peningkatan kemampuan dan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Kebijakan/tindakan yang perlu dilakukan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral provinsi Sumatera Barat sebagai upaya untuk mencapai target kinerja program/kegiatan antara lain adalah meningkatkan kapasitas SDM pelaksana program/kegiatan, mensinkronkan antara perencanaan (target kinerja) dengan penganggaran, menyusun kerangka acuan kegiatan dengan baik serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat s.d Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat s.d Tahun 2022

Tabel 1 T-C.29

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Pilihan									
	Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral									
3292	Program Pengelolaan aspek Geologi	Persentase luasan daerah konservasi air tanah	67%	37,5%	37,50%	37,5%	100,00%	55,00%	37,50%	56,97%
3292	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi	Terdatanya zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	1dok dan peta	-	1dok dan peta	1dok dan peta	100%	1dok dan peta	1dok dan peta	100,00%

3	2	9	0		Program Pengelolaan Ketanegalistrikan	Rasio Elektrifikasi	99.70%	99.87%	99.50%	99.98%	100.43%	99.80%	99.98%	100.28%
3	2	9	0	02	Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi	Tertaksananya Penatausahaan Izin Operasi di Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	3 Dokumen	300.00%
3	2	9	0	05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Terwujudnya penatausahaan izin operasi Prov Sumbang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen	3 Dokumen	300.00%
3	2	9	0	06	Kegiatan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Tersedianya pembangunan sarana tenaga listrik untuk daerah terpencil dan kelompok masyarakat tidak mampu	1100 KK	1 Tahun	1200 KK	1200 KK	100.00%	1200 KK	1200 KK	109.09%
					Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	36.7%	29%	28%	28%	100%	33.3%	29.00%	81.23%
					Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah reduksi CO2 Bidang Energi (non transportasi)	20 Ton CO2eq	20 Ton CO2eq	20 Ton CO2eq	20 Ton CO2eq	100%	20 Ton CO2eq	20 Ton CO2eq	100.00%

A

3	2	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	2	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Rencana Kerja 2024

3	2	9	0	1	08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terciptanya administrasi perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun	3 Tahun
3	2	9	0	1	09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terciptanya administrasi perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun	3 Tahun

Formulir E.29

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksiesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi	V	-	-	-
2	Pengolahan data dan informasi	V	-	-	-
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah	V	-	-	-
4	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah provinsi	V	-	-	-
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi	V	-	-	-
6	Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi	V	-	-	-
7	Perumusan tujuan dan sasaran	V	-	-	-
8	Penelaahan usulan masyarakat	V	-	-	-
9	Perumusan kegiatan prioritas	V	-	-	-
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi	V	-	-	-
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota	V	-	-	-
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi	V	-	-	-
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	V	-	-	-
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur	V	-	-	-
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	V	-	-	-
12	Program dan Kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah	V	-	-	-
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	V	-	-	-
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi yang telah disahkan	V	-	-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.

Pencapaian Kinerja Pelayanan dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator	SPM/Stan dar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi			28%	29%	33,30%	35,70%	28%	29%	33,30%	35,70%	Melaksanakan Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan	
2	Rasio Elektrifikasi			99,75%	99,50%	99,60%	99,70%	99,91%	99,98%	99,60%	99,70%	Melaksanakan penyambungan instalasi listrik kepada masyarakat baik yang berada dekat dengan jaringan PT. PLN maupun daerah terpencil dan perdesaan	

Rencana Kerja 2024

3	Perentase Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Baik dan Benar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	-	-	55%	-	45%	55%	45%	55%	Melaksanakan peningkatan tata kelola usaha Pertambangan Mineral Bukan logam dan batuan yang baik dan akuntabel
4	Persentase Luasan Daerah Konservasi Air Tanah	-	-	37,50%	55,00%	37,50%	67,00%	55,00%	67,00%	Melaksanakan penelilian daerah konservasi air tanah
5	Nilai Akuntabilitas	A	A	A	A	A	BB	BB	A	Melaksanakan komitmen yang kuat untuk terus menumbuhkan budaya kinerja melalui penerapan SAKJP
6	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Melaksanakan peningkatan layanan organisasi

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Adapun isu-isu strategis bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat antara lain adalah:

1. Sektor Energi dan Ketenagalistrikan
 - a. Optimalisasi konservasi energi, konservasi sumber daya energi dan diversifikasi energi.
 - b. Infrastruktur Pelayanan Dasar di Daerah belum berkembang, terpencil dan pedesaan yang belum terpenuhi.
2. Sektor Mineral dan Batubara

Meningkatnya Kebutuhan Material Konstruksi dan tidak meratanya keberadaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan sehingga berakibat pada kurang optimalnya tata kelola usaha pertambangan dan munculnya Pertambangan Tanpa Izin.
3. Sektor Air Tanah dan Geologi

Identifikasi Zona Kritis Air Tanah akibat pemaafaatan air tanah yang tidak terkontrol dan pengendalian air tanah pada zona konservasi.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. RKPD merupakan pedoman bagi OPD dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD). Dalam rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, terdapat 5 program, 18 kegiatan dengan 56 sub kegiatan. Namun sesuai dengan analisis kebutuhan yang sudah disusun diperlukan 5 program, 18 kegiatan dengan 58 sub kegiatan.

Direview dari jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 belum sesuai dengan RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sehingga diperlukan adanya tambahan 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
2. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.

Review program/kegiatan berdasarkan Rancangan Awal RKPD dan Analisis Kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Analisis Kebutuhan Tahun 2024

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan						Ket
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				14,634,814,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				38,506,414,000		
3.29.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	13,310,350,000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	14,636,100,000		
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Padang	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	560,750,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Padang	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	560,750,000		
3.29.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Padang	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	115,375,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Padang	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	115,375,000		
3.29.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	3 Dokumen	245,375,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	3 Dokumen	245,375,000		

Rencana Kerja 2024

3.29.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Padang	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	4 Dokumen	200,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Padang	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	4 Dokumen	200,000,000
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	8,233,075,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	8,233,075,000
3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	80 Orang	8,000,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	80 Orang	8,000,000,000
3.29.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Padang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	20 Orang	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Padang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	20 Orang	0
3.29.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Padang	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapakan	12 Dokumen	33,075,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Padang	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapakan	12 Dokumen	33,075,000
3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Padang	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	424,250,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Padang	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	550,000,000
3.29.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Padang	Jumlah pemeliharaan kepemilikan daerah	4 Unit	150,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Padang	Jumlah pemeliharaan kepemilikan daerah	4 Unit	150,000,000
3.29.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen usulan penetapan nilai barang milik daerah	1 Dokumen		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen usulan penetapan nilai barang milik daerah	1 Dokumen	

Rencana Kerja 2024

3.29.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	1 Dokumen	200,000,000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	1 Dokumen	200,000,000
3.29.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	1 Dokumen		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	1 Dokumen	
3.29.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Padang	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah dan jumlah pengelola BMD	1 Dokumen	74,250,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Padang	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah dan jumlah pengelola BMD	1 Dokumen	200,000,000
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Padang	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	305,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Padang	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	305,000,000
3.29.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	80 Snel	105,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	80 Snel	105,000,000
3.29.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Padang	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	1 Tahun	200,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Padang	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	1 Tahun	200,000,000
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1,394,989,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1,794,989,000

Rencana Kerja 2024

3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	500 Unit/Set/Buah	70,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Kota Padang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	500 Unit/Set/Buah	70,000,000
3.29.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Padang	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 Unit/Set/Buah	150,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Padang	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 Unit/Set/Buah	400,000,000
3.29.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1000 Unit/Set/Buah	80,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1000 Unit/Set/Buah	80,000,000
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	800 Unit/Set/Buah	60,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	800 Unit/Set/Buah	60,000,000
3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Padang	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6 Eksemplar	50,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Padang	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6 Eksemplar	50,000,000
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	1 Dokumen	934,989,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	1 Dokumen	934,989,000
3.29.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dalam dan Luar Provinsi Sumatera Barat	Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang dikelola	1 Dokumen	50,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dalam dan Luar Provinsi Sumatera Barat	Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang dikelola	1 Dokumen	200,000,000
3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Kota Padang	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	120,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kota Padang	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai	100%	720,000,000

4

Rencana Kerja 2024

3.29.01. 1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang	Jumlah kendaraan dinas operasional	2 Unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang	Jumlah kendaraan dinas operasional	1 Unit	600,000,000						
3.29.01. 1.07.05	Pengadaan Meubel	Kota Padang	Jumlah meubel	1 paket	120,000,000	Pengadaan Meubel	Kota Padang	Jumlah meubel	1 paket	120,000,000						
3.29.01. 1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Padang	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1 Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Padang	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1 Unit	0						
3.29.01. 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	1,622,286,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,622,286,000						
3.29.01. 1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang	Tertaksananya urusan surat menyurat	1 Tahun	25,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang	Tertaksananya urusan surat menyurat	1 Tahun	25,000,000						
3.29.01. 1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang	Jumlah tagihan internet, telp, air dan listrik (PLN) yang dibayarkan	500 Mbps, 2 rek, 200 m3/th dan 2000 kWh	450,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang	Jumlah tagihan internet, telp, air dan listrik (PLN) yang dibayarkan	500 Mbps, 2 rek, 200 m3/th dan 2000 kWh	450,000,000						
3.29.01. 1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	20 orang	1,147,286,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	20 orang	1,147,286,000						
3.29.01. 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan	Kota Padang	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100%	850,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan	Kota Padang	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	100%	850,000,000						

7

Rencana Kerja 2024

Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	11 Unit	250,000,000	Perencanaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	11 Unit	250,000,000
3.29.01.1.09.02	Pemeliharaan Meubel	Kota Padang	Jumlah Pemeliharaan Meubel	5 Unit	50,000,000	Pemeliharaan Meubel	Kota Padang	Jumlah Pemeliharaan Meubel	5 Unit	50,000,000
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 Unit	50,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 Unit	50,000,000
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 Unit	100,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 Unit	100,000,000
3.29.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Padang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab (Lift, AC)	50 Unit	100,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Padang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab (Lift, AC)	50 Unit	100,000,000
3.29.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Padang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	2 Lantai	300,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Padang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	2 Lantai	300,000,000

3.29.02	Program Pengelolaan Aspek Geologi	Provinsi Sumatera Barat	Persentase luasan daerah konservasi air tanah	67%	274,440,000	Program Pengelolaan Aspek Geologi	Provinsi Sumatera Barat	Persentase luasan daerah konservasi air tanah	67%	600,000,000
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	Terdapatnya zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	1 Dokumen dan Peta	195,000,000	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	Terdapatnya zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	1 Dokumen dan Peta	380,000,000
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	1 Dokumen dan Peta	195,000,000	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	1 Dokumen dan Peta	380,000,000
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	Terkendalinya dan terawasinya pemanfaatan air tanah	1 Laporan	79,440,000	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	Terkendalinya dan terawasinya pemanfaatan air tanah	1 Laporan	220,000,000
3.29.02.1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Provinsi Sumatera Barat	Tertaksananya monitoring pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah	30 Sumur Bor/Sumur Gali	79,440,000	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Provinsi Sumatera Barat	Tertaksananya monitoring pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah	30 Sumur Bor/Sumur Gali	220,000,000
3.29.03	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Provinsi Sumatera Barat	Persentase Peningkatan izin usaha pertambangan sesuai Peraturan Undang-undang	55%	26,471,000	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Provinsi Sumatera Barat	Persentase Peningkatan izin usaha pertambangan sesuai Peraturan Undang-undang	55%	1,450,000,000
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Provinsi	1 Dokumen	9,500,000	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Provinsi	1 Dokumen	485,000,000

Rencana Kerja 2024

3.29.03.1.01.01	dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Sumatera Barat	1 Dokumen	3.000,000	Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Logam dan Batuan Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	150.000,000
3.29.03.1.01.02	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	3.000,000	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	150.000,000
3.29.03.1.01.03	Penerbitan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	3.500,000	Penerbitan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	185.000,000

	Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	daerah Provinsi	1 Dokumen	3.29.03.1.03
Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	8.750.000	Terlaksananya Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	685.000.000
Logam dan Batuan dalam daerah Provinsi	Pertambangan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Usaha Pertambangan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	685.000.000

7

Rencana Kerja 2024

<p>3.29.03. 1.03.03</p>	<p>Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah dan Daerah Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</p>	<p>Provinsi Sumatera Barat</p>	<p>Tersedianya Data dan Informasi Rekomendasi Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Daerah Provinsi</p>	<p>1 Laporan</p>	<p>2,500,000</p>	<p>Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah dan Daerah Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</p>	<p>Tersedianya Data dan Informasi Rekomendasi Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Daerah Provinsi</p>	<p>1 Laporan</p>	<p>185,000,000</p>
<p>3.29.03. 1.03.04</p>	<p>Pengendalian dan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah dan Daerah Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</p>	<p>Provinsi Sumatera Barat</p>	<p>Terkendali dan terawasannya Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Provinsi Sumatera Barat</p>	<p>1 Laporan</p>	<p>3,200,000</p>	<p>Pengendalian dan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah dan Daerah Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</p>	<p>Terkendali dan terawasannya Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Provinsi Sumatera Barat</p>	<p>1 Laporan</p>	<p>250,000,000</p>

17

Rencana Kerja 2024

	12 Mil Laut		1 laporan	3,050,000	Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	
3.29.03 1.03.05	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Kaidah Pertambangan yang baik dalam Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1 laporan	250,000,000	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Kaidah Pertambangan yang baik dalam Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

17

Rencana Kerja 2024

3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Usaha Pertambangan Rakyat dalam Wilayah Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	6,221,000	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Usaha Pertambangan Rakyat dalam Wilayah Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	280,009,000
3.29.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Provinsi Sumatera Barat	Terkordinasinya dan Sinkronisasi Penyusunan Wilayah Pertambangan Rakyat dalam Wilayah Provinsi Sumatera Barat	1 laporan	2,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Provinsi Sumatera Barat	Terkordinasinya dan Sinkronisasi Penyusunan Wilayah Pertambangan Rakyat dalam Wilayah Provinsi Sumatera Barat	1 laporan	50,000,000
3.29.03.1.04.03	Penyusunan dan Rekomendasi Penzinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya Data dan Informasi Rekomendasi Penzinan Usaha Pertambangan Rakyat dalam Daerah provinsi	1 laporan	2,000,000	Penyusunan dan Rekomendasi Penzinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya Data dan Informasi Rekomendasi Penzinan Usaha Pertambangan Rakyat dalam Daerah provinsi	1 laporan	130,000,000

Rencana Kerja 2024

3.29.03.1.04.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Provinsi Sumatera Barat	Terkendali dan terawasannya Pelaksanaan Usaha Pertambangan Rakyat dalam Provinsi Sumatera Barat	1 dokumen	2,121,000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Provinsi Sumatera Barat	Terkendali dan terawasannya Pelaksanaan Usaha Pertambangan Rakyat dalam Provinsi Sumatera Barat	1 dokumen	50,000,000
3.29.03.1.04.05	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Provinsi Sumatera Barat	Tertaksananya Reklamasi dan Pascatambang pada Izin Pertambangan Rakyat di Sumatera Barat	1 dokumen	2,100,000	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Provinsi Sumatera Barat	Tertaksananya Reklamasi dan Pascatambang pada Izin Pertambangan Rakyat di Sumatera Barat	1 dokumen	50,000,000
3.29.05.1.04	Program Pengelolaan Energi Terbarukan Kegiatan : Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi Jumlah Reduksi CO2 Bidang Energi (non transportasi)	35.7% 20 Ton CO2eq	373,239,000	Program Pengelolaan Energi Terbarukan Kegiatan : Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi Jumlah Reduksi CO2 Bidang Energi (non transportasi)	35.7% 20 Ton CO2eq	10,300,000,000
3.29.05.1.04.01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya Perda Pengelolaan Energi		373,239,000	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya Perda Pengelolaan Energi		150,000,000

Rencana Kerja 2024

3.29.05.1.04.02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	1 Laporan	23,239,000	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	1 Laporan	50,000,000
3.29.05.1.04.03	Sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan Konservasi Energi	Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Sosialisasi Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	1 Laporan	20,000,000	Sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan Konservasi Energi	Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Sosialisasi Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	1 Laporan	20,000,000
3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Provinsi Sumatera Barat	Terbangunnya Infrastruktur Konservasi Energi	1 Unit	250,000,000	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Provinsi Sumatera Barat	Terbangunnya Infrastruktur Konservasi Energi	1 Unit	10,000,000,000
3.29.05.1.04.06	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi		Terlaksananya Bimbingan Teknis Konservasi Energi	1 Laporan	80,000,000	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi		Terlaksananya Bimbingan Teknis Konservasi Energi	1 Laporan	80,000,000
3.29.06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Provinsi Sumatera Barat	Rasio Elektrifikasi	99.70	660,314,000	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Provinsi Sumatera Barat	Rasio Elektrifikasi	99.70	11,520,314,000

Rencana Kerja 2024

3.29.06.1.01	<p>Kegiatan : Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi</p>	<p>Provinsi Sumatera Barat</p>	<p>Tersedianya Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>50,000,000</p>	<p>Kegiatan : Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi</p>	<p>Provinsi Sumatera Barat</p>	<p>Tersedianya Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>70,000,000</p>
3.29.06.1.01.02	<p>Penyusunan Rekomendasi Penzinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi</p>	<p>Provinsi Sumatera Barat</p>	<p>Tersedianya rekomendasi teknis Penzinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>50,000,000</p>	<p>Penyusunan Rekomendasi Penzinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi</p>	<p>Provinsi Sumatera Barat</p>	<p>Tersedianya rekomendasi teknis Penzinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>70,000,000</p>

A

Rencana Kerja 2024

3.29.06.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya Data Pengendalian dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	50,000,000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya Data Pengendalian dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	70,000,000
3.29.06.1.02	Kegiatan : Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	Telaksananya Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	180,000,000	Kegiatan : Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	Telaksananya Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	170,000,000
3.29.06.1.02.01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratkan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya Prosedur dan Pesyaratkan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	50,000,000	Penetapan Prosedur dan Pesyaratkan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya Prosedur dan Pesyaratkan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	50,000,000
3.29.06.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam	Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam	1 laporan	50,000,000	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam	Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam	1 laporan	50,000,000

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat

4

Rencana Kerja 2024

3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penzinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya data pengendalian dan pengawasan izin operasi	1 laporan	50.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penzinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya data pengendalian dan pengawasan izin operasi	1 laporan	70.000.000
3.29.06.1.05	Kegiatan : Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	1 Dokumen	50.000.000	Kegiatan : Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	1 Dokumen	70.000.000
3.29.06.1.05.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penzinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya Data Pengendalian dan Pengawasan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	1 Laporan	50.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penzinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya Data Pengendalian dan Pengawasan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	1 Laporan	70.000.000

14

3.29.06.1.06	Kegiatan : Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1200 KK	400,314,000	Kegiatan : Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1200 KK	11,210,314,000
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	50,000,000	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	70,000,000
3.29.06.1.06.02	Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Provinsi Sumatera Barat	Terbangunnya Instalasi Listrik bagi Kelompok Masyarakat Tidak Mampu yang dilewati jaringan listrik	1100 KK	10,000,000	Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Provinsi Sumatera Barat	Terbangunnya Instalasi Listrik bagi Kelompok Masyarakat Tidak Mampu yang dilewati jaringan listrik	1100 KK	5,000,000,000
3.29.06.1.06.04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya data dan informasi awal potensi energi	1 laporan	50,000,000	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang	Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya data dan informasi awal potensi energi	1 laporan	50,000,000

7

3.29.06.1.06.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya data Ratio Elektrifikasi (RE) dan Ratio Desa Berlistrik (RD) Terverifikasi DJL dan PLN	1 Laporan	40,314,000	Daerah Terpencil dan Perdesaan	Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya data Ratio Elektrifikasi (RE) dan Ratio Desa Berlistrik (RD) Terverifikasi DJL dan PLN	1 Laporan	40,314,000
3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Provinsi Sumatera Barat	Terbangunnya PLTS Tersebar/SHS Revit PLTMH	20 Unit 2 Paket	200,000,000	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Provinsi Sumatera Barat	Terbangunnya PLTS Tersebar/SHS Revit PLTMH	20 Unit 2 Paket	6,000,000,000
3.29.06.1.06.07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Provinsi Sumatera Barat	Tertatanya pengelolaan pembangkit EBT Perdesaan	1 Laporan	50,000,000	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Provinsi Sumatera Barat	Tertatanya pengelolaan pembangkit EBT Perdesaan	1 Laporan	50,000,000
J U M L A H										38,506,4144,000
J U M L A H										14,634,814,000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk tahun 2024 tidak ada usulan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan.

Tabel 4 T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Provinsi Sumatera Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Cartatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku kementerian teknis yang mengelola urusan ESDM sampai dengan saat ini telah menyusun Rencana Strategis Kementerian Tahun 2020-2024. Adapun prioritas pembangunan sektor ESDM lima tahun kedepan berdasarkan Siaran Pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 658.Pers/04/SJ/2019 tanggal 14 November 2019 adalah (a). Menuntaskan program 35.000 Mega Watt (MW) pada akhir tahun 2024, (b). Mendorong pemanfaatan sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dalam hal ini adalah pemanfaatan biodiesel, (c). Pembangunan transmisi listrik dan gas, (d). Peningkatan Domestic Market Obligation (DMO) Batubara dan (e). Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mempermudah eksekusi kebijakan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan sektor ESDM di tingkat Pemerintah Provinsi berupaya untuk mendukung lima prioritas pembangunan pembangunan sektor ESDM yang telah ditetapkan oleh Kementrian ESDM Republik Indonesia dengan menyusun dan melaknakan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana terinci pada Bab IV Renacana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat adalah Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan, Mewujudkan Pertambangan Berwawasan Lingkungan, Optimalisasi konservasi Air Tanah serta Meningkatkan Organisasi yang Akuntabel dan Melayani.

Sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan.
2. Pemantapan Pasokan Ketenagalistrikan yang Andal, Efisien dan Berkelanjutan.
3. Peningkatan Tata Kelola Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang Baik dan Akuntabel.
4. Meningkatkan Daerah Konservasi Air Tanah.

5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi.
6. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi.

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu :

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- Pencapaian SDGs.
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.
- Pengembangan daerah terisolir.

Tahun 2024 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat merencanakan mengajukan 5 program, 18 kegiatan dengan 64 sub kegiatan yang tersebar di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan total kebutuhan dana sebesar Rp. 14.634.814.000.

Program pembangunan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat yang direncanakan pelaksanaannya tahun 2024 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi
2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
3. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
4. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
5. Program Pengelolaan Ketanagalistrikan

Adapun kegiatan penunjang pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
 - a. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
 - b. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
3. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
 - a. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
 - b. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

- c. Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
4. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
 - a. Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
 - a. Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
 - b. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
 - c. Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri
 - d. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

Rencana Program dan kegiatan untuk tahun 2024 secara terperinci disajikan dalam tabel 5 T-C.33 pada Bab IV.

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disusun sebagaimana tabel 5 T-C.33 berikut :

Tabel 5 T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				14,634,814,000				14,873,127,799
3.29.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	13,310,360,000	APBD		100%	13,501,814,799
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Kota Padang	100%	560,760,000	APBD		100%	560,760,000
3.29.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	Kota Padang	2 Dokumen	115,375,000	APBD		2 Dokumen	115,375,000
3.29.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	Kota Padang	3 Dokumen	245,375,000	APBD		3 Dokumen	245,375,000
3.29.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	Kota Padang	4 Dokumen	200,000,000	APBD		4 Dokumen	200,000,000
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Kota Padang	100%	8,033,075,000	APBD		100%	8,333,075,000

Rencana Kerja | 2024

3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Kota Padang	80 Orang	8,000,000,000	APBD	60 Orang	8,300,000,000
3.29.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Kota Padang	20 Orang	0	APBD	20 Orang	0
3.29.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	Kota Padang	12 Dokumen	33,075,000	APBD	12 Dokumen	33,075,000
3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Padang	100%	424,250,000	APBD	100%	475,000,000
3.29.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah pemeliharaan kepemilikan daerah	Kota Padang	4 Unit	150,000,000	APBD	4 Unit	150,000,000
3.29.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen usulan penetapan nilai barang milik daerah	Kota Padang	1 Dokumen		APBD	1 Dokumen	
3.29.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	Kota Padang	1 Dokumen	200,000,000	APBD	1 Dokumen	250,000,000
3.29.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Kota Padang	1 Dokumen		APBD	1 Dokumen	
3.29.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah dan jumlah pengelola BMD	Kota Padang	1 Dokumen	74,250,000	APBD	1 Dokumen	75,000,000
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Padang	100%	305,000,000	APBD	100%	305,000,000
3.29.01.1.05.02	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakelan dinas beserta atribut kelengkapannya	Kota Padang	80 Setel	105,000,000	APBD	80 Setel	105,000,000
3.29.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Kota Padang	1 Tahun	200,000,000	APBD	1 Tahun	200,000,000

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat

4

Rencana Kerja | 2024

3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terbit Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang	100%	1,394,989,001	APBD	100%	1,036,703,800
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Padang	500 Unit/Set/Buah	70,000,000	APBD	500 Unit/Set/Buah	30,699,000
3.29.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Pengekspansikan Kantor	Jumlah Peralatan dan Pengekspansikan Kantor yang disediakan	Kota Padang	6 Unit/Set/Buah	150,000,000	APBD	6 Unit/Set/Buah	150,046,000
3.29.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Padang	1000 Unit/Set/Buah	80,000,000	APBD	1000 Unit/Set/Buah	50,000,000
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Padang	800 Unit/Set/Buah	60,000,000	APBD	800 Unit/Set/Buah	59,301,800
3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kota Padang	6 Eksemplar	50,000,000	APBD	6 Eksemplar	24,840,000
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Kota Padang	1 Dokumen	934,989,001	APBD	1 Dokumen	670,817,000
3.29.01.1.06.10	Penalaksanaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang dikelola	Dalam dan Luar Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	50,000,000	APBD	1 Dokumen	50,000,000
3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Kota Padang	100%	120,000,000	APBD	100%	320,000,000
3.29.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional	Kota Padang	2 Unit			2 Unit	
3.29.01.1.07.05	Pengadaan Meubel	Jumlah meubel	Kota Padang	1 paket	120,000,000		1 paket	120,000,000
3.29.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Kota Padang	1 Unit	0		1 Unit	200,000,000

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat

19

Rencana Kerja | 2024

Bangunan Lainnya									
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang	100%	1,622,285,999	APBD	100%	1,622,285,999	
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya urusan surat menyurat	Kota Padang	1 Tahun	25,000,000	APBD	1 Tahun	25,000,000	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan internet, telp, air dan listrik (PLN) yang dibayarkan	Kota Padang	500 Mbps, 2 rek, 200 m3/th dan 2000 kWh	450,000,000	APBD	500 Mbps, 2 rek, 200 m3/th dan 2000 kWh	450,000,000	
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Kota Padang	20 orang	1,147,285,999		20 orang	1,147,285,999	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	Kota Padang	100%	850,000,000	APBD	100%	850,000,000	
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Kota Padang	11 Unit	250,000,000	APBD	11 Unit	250,000,000	
3.29.01.1.09.05	Pemeliharaan Meubel	Jumlah Pemeliharaan Meubel	Kota Padang	5 Unit	50,000,000	APBD	50 Unit	50,000,000	
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang	50 Unit	50,000,000	APBD	50 Unit	50,000,000	
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	Kota Padang	1 Unit	100,000,000	APBD	1 Unit	100,000,000	
3.29.01.1.09.10	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/rehab (LIN, AC)		50 Unit	100,000,000	APBD	50 Unit	100,000,000	

7

3.29.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	Kota Padang	2 Lantai	300,000,000	APBD	2 Lantai	300,000,000
3.29.02	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase luasan daerah konservasi air tanah	Provinsi Sumatera Barat	67%	274,440,000	APBD	83%	284,148,000
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terdatanya zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen dan Peta	195,000,000	APBD	1 Dokumen dan Peta	200,000,000
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Tersedianya data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen dan Peta	195,000,000	APBD	1 Dokumen dan Peta	200,000,000
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terkendalinya dan terawasinya pemanfaatan air tanah	Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	79,440,000		1 Laporan	84,148,000
3.29.02.1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Tertindakannya monitoring pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah	Provinsi Sumatera Barat	30 Sumur Bor/Sumur Gali	79,440,000	APBD	30 Sumur Bor/Sumur Gali	84,148,000
3.29.03	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase Peningkatan Izin usaha pertambangan sesuai Peraturan Perundang Undangan	Provinsi Sumatera Barat	55%	26,471,000	APBD	70%	27,407,000
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Tersedianya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	9,500,000	APBD	1 Dokumen	9,407,000

3.29.03.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Tersedianya data informasi WIUP dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	3.000.000	APBD	1 Dokumen	3.207.000
3.29.03.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Tersedianya peta WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan	Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	3.000.000	APBD	1 Dokumen	3.000.000
3.29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terkendalanya Pengelolaan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam daerah Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	3.500.000	APBD	1 Laporan	3.200.000
3.29.03.1.03	Penaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Tertaksananya Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	6.750.000	APBD	1 Dokumen	9.000.000

3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Penzinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Tersedianya Data dan Informasi Rekomendasi Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Daerah Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	2.500.000	APBD	1 Laporan	3.000.000
3.29.03.1.03.04	Pengawasan dan Pelaksanaan Penzinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terkendali dan terawasnya Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	3.200.000	APBD	1 Laporan	3.000.000
3.29.03.1.03.05	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Pertzinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah	Terlaksananya Kaidah Pertambangan yang baik dalam Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Provinsi Sumatera Barat	1 laporan	3.050.000	APBD	1 laporan	3.000.000

4

Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut										
3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Tetaksananya Usaha Pertambangan Rakyat dalam Wilayah Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	9,221,000	APBD			1 Dokumen	9,000,000
3.29.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penelapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Tertkoordinasinya dan Sinkronisasi Penyusunan Wilayah Pertambangan Rakyat dalam Wilayah Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat	1 laporan	2,000,000	APBD			1 laporan	2,250,000
3.29.03.1.04.03	Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Tersedianya Data dan Informasi Rekomendasi Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat dalam Daerah provinsi	Provinsi Sumatera Barat	1 laporan	2,000,000	APBD			1 laporan	2,250,000
3.29.03.1.04.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara,	Terkendali dan terewasnya Pelaksanaan Usaha Pertambangan Rakyat dalam Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat	1 dokumen	2,121,000	APBD			1 dokumen	2,250,000

A

Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat									
3.29.03.1.04.05	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Terlaksananya Reklamasi dan Pascatambang pada Izin Pertambangan Rakyat di Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat	1 dokumen	2,100,000	APBD		1 dokumen	2,250,000
3.29.05	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Provinsi Sumatera Barat	35.7%	373,239,000	APBD		51.7%	386,441,000
3.29.05.1.04	Kegiatan : Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah Reduksi CO2 Bidang Energi (non transportasi)	Provinsi Sumatera Barat	20 Ton CO2eq	373,239,000	APBD		20 Ton CO2eq	386,441,000
3.29.05.1.04.01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Tersedianya Perda Pengelolaan Energi	Provinsi Sumatera Barat			APBD			
3.29.05.1.04.02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	23,239,000	APBD		1 Laporan	26,441,000
3.29.05.1.04.03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Terlaksananya Sosialisasi Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	20,000,000	APBD		1 Laporan	20,000,000
3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Terbangunnya Infrastruktur Konservasi Energi	Provinsi Sumatera Barat	1 Unit	250,000,000	APBD		1 Unit	260,000,000
3.29.05.1.04.06	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Bimbingan Teknis Konservasi Energi	Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	80,000,000			1 Laporan	80,000,000

7

3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi	Provinsi Sumatera Barat	99.70	650,314,000	APBD	99.80	673,317,000
3.29.06.1.01	Kegiatan : Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	50,000,000	APBD	1 Dokumen	100,000,000
3.29.06.1.01.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Tersedianya rekomendasi teknis Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Provinsi Sumatera Barat			APBD	1 Dokumen	50,000,000
3.29.06.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Tersedianya Data Pengendalian dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	50,000,000	APBD	1 Laporan	50,000,000
3.29.06.1.02	Kegiatan : Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas	Telaksananya Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya	Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	150,000,000	APBD	1 Dokumen	100,000,000

	Instalasinya dalam Daerah Provinsi	dalam Daerah Provinsi						
3.29.06.1.02.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Tersedianya Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	50,000,000	APBD		
3.29.06.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Tersedianya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	1 laporan	50,000,000		1 laporan	50,000,000
3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Tersedianya data pengendalian dan pengawasan izin operasi	Provinsi Sumatera Barat	1 laporan	50,000,000	APBD	1 laporan	50,000,000
3.29.06.1.05	Kegiatan : Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	50,000,000	APBD	1 Dokumen	50,000,000
3.29.06.1.05.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Tersedianya Data Pengendalian dan Pengawasan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	50,000,000	APBD	1 Laporan	50,000,000

A

3.29.06.1.06	Kegiatan : Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Tersedianya listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Provinsi Sumatera Barat	1200 KK	400,314,000	APBD	1100 KK	423,317,000
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dan Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Tersedianya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	50,000,000	APBD	1 Dokumen	50,000,000
3.29.06.1.06.02	Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terbangunnya Instalasi Listrik bagi Kelompok Masyarakat tidak Mampu yang diawasi jeringan listrik	Provinsi Sumatera Barat	1100 KK	10,000,000		1000 KK	10,000,000
3.29.06.1.06.04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Tersedianya data dan informasi awal potensi energi	Provinsi Sumatera Barat	1 laporan	50,000,000		1 laporan	50,000,000
3.29.06.1.06.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Tersedianya data Ratio Elektrifikasi (RE) dan Ratio Desa Berlistrik (RD) Terverifikasi DJL dan PLN	Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	40,314,000		1 Laporan	50,000,000
3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terbangunnya PLTS Tersebar/SHS Revt PLTMH	Provinsi Sumatera Barat	20 Unit 2 Paket	200,000,000		20 Unit 2 Paket	200,000,000

7

Rencana Kerja 2024

3.29.06.1.06.07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Tertatnya pengelolaan pembangkit EBT Perdesaan	Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	63,317,000
-----------------	---	--	-------------------------	-----------	------------	-----------	------------

V. PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2024 merupakan acuan dalam penyusunan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 baik judul kegiatan maupun jumlah anggarannya. Dalam melaksanakan kegiatan yang telah diajukan, haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah pelaksanaan yaitu efisien, efektif dan tepat guna.

Setelah Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk tahun 2024 dibuat, maka perlu dipersiapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun 2024 serta Pra RKA, RKA dan DPA. Dalam pendanaan haruslah mengoptimalkan anggaran yang telah ditetapkan tanpa mengabaikan indikator kinerja dan target kerjanya.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2024, sebagai upaya mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun di Kab/Kota se Sumatera Barat.

Padang, Juli 2023

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Provinsi Sumatera Barat



Ir. Herry/Martinus, MM
NIP. 19650310 199303 1 004